



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 12(2), 211-218



RESEARCH ARTICLE

PERANG DIPONEGORO SEBAGAI TENDANGAN BOLA SALJU KEMERDEKAAN INDONESIA

M. Hasanuddin Wahid, Hari Suyanto

Program Doktorat Universitas Pertahanan RI
damar.arthur@gmail.com

To cite this article: Wahid, M. H., & Suyanto, H. (2023). Perang Diponegoro sebagai tendangan bola salju kemerdekaan indonesia. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(2), 211-218. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.63898>.

Abstract

The Diponegoro War, which lasted for five years from 1825-1830, was motivated by Prince Diponegoro's dislike of interfering too much with the internal affairs of the Yogyakarta Palace, plus the Dutch action unilaterally fixing the land to be used by the railroad crossing the land of Prince Diponegoro's ancestral grave, this sparked anger until there was resistance to the Dutch Colonialism. The researcher was inspired by Ustadz Salim.A.Fillah's lectures, which often discussed the story of the Java War, especially the history of Prince Diponegoro, where if sequenced from Prince Diponegoro's resistance, stelsel fort, cultuur stelsel, ethical politics to the mobilization of students led by aristocrats who were literate in politics as a kick a snowball of the Indonesian national movement towards independence. This research aims to show that the millennial generation has primarily forgotten the nation's current historical experience, and awareness of participating in defending the country is deficient; therefore, the researcher hopes that the continuity of the story of the Diponegoro war so that the national movement against colonialism can contribute to the awareness of defending the country for the next generation of the nation.

Abstrak

Perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun dari 1825-1830 dilatarbelakangi oleh ketidaksukaan Pangeran Diponegoro terlalu turut campur dengan urusan internal Keraton Yogyakarta ditambah lagi tindakan Belanda secara sepihak mematok tanah yang akan digunakan rel kereta api melewati tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro, hal tersebut menyulut kemarahan hingga terjadi perlawanan kepada Kolonial Belanda. Peneliti terinspirasi dari ceramah Ustadz Salim.A.Fillah yang sering mengupas mengenai kisah Perang Jawa terutama sejarah Pangeran Diponegoro dimana jika diurutkan sejak perlawanan Pangeran Diponegoro, *benteng stelsel*, *cultuur stelsel*, politik etis hingga pergerakan mahasiswa yang dipelopori kaum ningrat yang melek akan politik sebagai tendangan bola salju pergerakan nasional bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan bahwa pengalaman sejarah bangsa saat ini sudah banyak dilupakan oleh generasi millennial, kesadaran ikut serta dalam bela negara sangat rendah oleh sebab itu harapan peneliti kesinambungan kisah perang Diponegoro ini hingga pergerakan nasional melawan penjajahan dapat memberikan kontribusi bagi kesadaran bela negara generasi penerus bangsa.

Article Info

Article History:
Received 11 Mei 2021
Revised 16 July 2022
Accepted 28 June 2023
Available online 1 October 2023

Keyword:

Cultuur Stelsel
Diponegoro War
Ethical Politics
Fort Stelsel

PENDAHULUAN

Pangeran Diponegoro sebagai putra bangsawan mempunyai nama saat masih kecil adalah Bendoro Raden Mas Mustahar. Lahir di Keraton Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 (Carey 2014, hlm. 3). Sebagai cucu Sultan Hamengku Buwono II dan ayahnya adalah putra sulung dari istri permasuri Ratu Kedaton (1750-1820). Bayi Diponegoro dibawa oleh Kakek Buyutnya Sultan Hamengku Buwono I dan dipercayakan pada asuhan Ratu Ageng, Raja lanjut usia tersebut sudah memiliki firasat bahwa cucu buyutnya kelak akan memberi kerusakan yang luar biasa terhadap penjajahan Belanda melebihi yang pernah dia buat selama Perang Giyanti (1746-1755).

Pada tulisan dalam Babad Diponegoro 11:45 memberikan hal yang sangat penting akan kedekatan antara Diponegoro dengan Hamengku Buwono I sebagai Raja yang sangat kharismatik dan memberikan inspirasi kepada sang pangeran saat meletusnya Perang Jawa (1825-1830).

Adopsi yang dilakukan Ratu Ageng yang menjadi pelindung setelah pendiri Keraton Yogyakarta memprediksi atau tepatnya meramalkan bahwa masa depan luar biasa kepada bayi Diponegoro. Apapun kondisinya saat itu Sang Pangeran menjalankan hidup masa kanak-kanaknya hidup dengan seorang wanita sepuh yang luar biasa dengan pandangannya, kritis pemikirannya atas perkembangan keraton yang saat itu dipimpin seorang Raja yang sewenang-wenang dan tidak mumpuni.

Pindah ke Tegalrejo Ratu Ageng mendidik sang pangeran dengan bekal ilmu agama sebagai santri, belajar bertani menyamakan diri tanpa pamrih dalam jalan kasihNya pada Sang Hyang Sukma (Babad Diponegoro, II: 45-6). Metode Ratu Ageng dalam mengelola Tegalrejo sangat hati-hati untuk berdagang di pantai utara dan juga tempat asal beliau di Bima, hal tersebut membuat kesan mendalam bagi Diponegoro muda, maka jika dibandingkan dengan para pangeran seusianya Diponegoro adalah pangeran yang memiliki penghasilan besar

tanpa melakukan pemerasan atau pemberian upeti, disitulah kelak sebagai anggaran Perang Jawa pada tahap awal.

Tulisan ini terinspirasi dari ceramah Ustadz Salim A. Fillah dalam dakwah Perjuangan Diponegoro dan Babad Tanah Jawi. Dalam ceramahnya menyebutkan bahwa perjuangan Diponegoro sebagai tendangan salju kemerdekaan Indonesia. Menurut Fillah bahwa dampak 5 tahun Perang Diponegoro menyebabkan kerusakan yang luar biasa, hal tersebut membuat Belanda harus membangun benteng dari Kertosono Jawa Timur hingga di Cilacap Jawa Tengah yang terkenal dengan *Benteng Stelsel*, kemudian kerugian secara materi Belanda memaksa menerapkan *Cultuur Stelsel* oleh Johannes Van Den Bosch. Pada program ini setidaknya pendapat Belanda 875 juta gulden (Fillah, 2023) dengan sistem tanam paksa, maka menimbulkan pertentangan dari salah satu tokoh terkenal Edward Duowes Dekker dengan samarannya dengan nama pena Multatuli (saya sudah cukup menderita) yang tertuang dalam novel satir Max Havelaar dengan judul *Or the coffee auctions of the Dutch trading company* ditulis pada tahun 1860. Novel tersebut memuat kritikan terhadap kolonial Belanda di Indonesia, dengan menceritakan tokoh utamanya berjuang melawan kolonialisme yang korup di Jawa.

Belanda mempunyai nilai positif dalam hal perekonomian diakhir abad XIX dengan datangnya para pegawai kolonial Belanda dengan membawa pemikiran tentang politik etis yang juga ditetapkan oleh Ratu Wilhelmina dengan memusatkan pada pembangunan irigasi dan memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Politik etis ini disebut juga sebagai politik balas budi, hal tersebut membuat para ningrat yang mempunyai kesempatan sekolah menjadi cendekiawan ningrat. Lembaga sekolah yang didirikan oleh Belanda justru menjadi embrio pergerakan nasional oleh para mahasiswa nya. Penulis berharap tulisan ini memberikan kontribusi kepada pembaca untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dalam rangka membela negara,

meningkatkan kesadaran nasional akan falsafah sebagai Bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian sejarah merupakan suatu penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian masa lalu perjalanan hidup manusia. Tujuan penelitian ini membuat suatu rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif (Herlina, 2020). Metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau dan proses penelitian terdiri dari penyelidikan, menjelaskan juga memahami kegiatan atau suatu peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Metode sejarah memiliki empat langkah yang saling terkait.

Teknik heuristik sebagai metode mencari sumber-sumber sejarah terdiri dari sumber sekunder berupa buku-buku, majalah, jurnal dan ceramah. Saat ini yang didapatkan peneliti dalam mencari keaslian isi dari sumber kebenaran atau kekeliruan yang bisa saja terjadi. Tujuan mencari banyak sumber sejarah supaya tidak terjadi kesalahan maka diambil langkah kritik ektern.

Sedangkan intepretasi adalah upaya penulis untuk menghubungkan fakta dan penafsiran yang dituangkan dalam tulisan oleh karena itu penafsiran harus tetap obyektif. Meskipun dalam keadaan tertentu bisa juga bersikap subyektif rasional tetapi jangan emosional, dan rekonstruksi suatu peristiwa sejarah setidaknya mampu menghasilkan fakta sejarah yang benar atau setidaknya mendekati kebenaran.

PEMBAHASAN

Setelah mengumpulkan data dari studi literatur dan membaca berbagai macam sumber maka penulis mendapatkan hasil rekonstruksi sejarah yang menarik. Pada awalnya mempelajari ilmu sejarah Perang Diponegoro (1825-1830) dalam penelitian histografi sebenarnya tujuan kedua belah pihak mempertahankan kadaulatan wilayah atau merebut kadaulatan negara?. Sehingga dengan kobaran pertempuran tersebut membuat

benang merah kebangkitan nasional yang pada akhirnya Indonesia memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda.

Situasi dan kondisi politik Kerajaan Mataram, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sedang tidak dalam kondisi baik. Perjanjian Gianti (1755) yang menyebabkan pecahnya wilayah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Campur tangan Belanda sejak itu semakin dalam terhadap urusan internal kerajaan terutama Keraton Yogyakarta. Bukti adanya campur tangan Belanda adalah saat Hamengkubuwono II diturunkan tahtanya oleh Belanda dan digantikan oleh Hamenkubowono III yang berkuasa dan diangkat oleh Belanda (Sejarah perang-perang nusantara jilid 4, 2003, hlm. 160).

Pengaruh campur tangan Belanda tersebut menimbulkan kekecewaan dan memunculkan golongan anti-Belanda didalam internal keraton. Sebenarnya Diponegoro yang tinggal jauh dari keraton tidak lagi memperdulikan urusan didalam, kekecewaan Diponegoro sepertinya bagaikan doktrin dari Sang Nenek yaitu Ratu Ageng Tegalrejo akan sikap Sultan dan para pejabat keraton, hal tersebut menabur benih-benih kebencian Diponegoro yang justru membuat Belanda menilai bahwa Diponegoro menampakkan sikap kontra terhadap Belanda tidak seperti para elit keraton.

Kebencian Diponegoro ditambah dengan laporan bahwa Belanda memberikan patok untuk membuat jalan raya yang melewati tanah makam leluhur Diponegoro, sebagai pemilik tanah tentu membuat Diponegoro marah karena pihak Belanda tanpa ada pemberitahuan awal, maka dalam bentuk protes nya Diponegoro memerintahkan pengikutnya untuk mencabut semua patok-patok tersebut tetapi Belanda tidak jera dan melakukannya berulang kali yang juga membuat kemarahan rakyat. Sejak campur tangan Belanda dalam urusan keraton menyebabkan kekeruhan dan kekacauan keluarga keraton dan bisa dikatakan salah satu penyebab perlawanan terhadap Belanda.

Perlawanan Diponegoro yang awalnya dipicu oleh tindakan Belanda membangun jalan melewati tanah leluhur Diponegoro seperti halnya berbuntut panjang dengan diserangnya Tegalrejo pada tanggal 20 Juli 1825 oleh Belanda. Serangan itu berupa pengrusakan dan pembakaran yang membuat terkejut para pengikut Diponegoro. Perlawanan pun terjadi namun kekuatan yang tidak seimbang membuat pertimbangan Diponegoro untuk menarik pengikutnya ke daerah Bantul menuju desa Kalisoko (Sagimun,1986, hlm. 51). Desa ini merupakan tempat menetap keluarga Pangeran Mangkubumi yang dijadikan sebagai pelindung.

Pasukan Diponegoro memilih Selarong sebagai markas dan tempat untuk mengatur siasat perangnya. Pada awalnya perlawanan Diponegoro belum terorganisir rapi baik dari pola serangan maupun strategi. Serangan masih bergerombol pada malam hari memasuki kota dengan melakukan perusakan bersama rakyat dengan senjata seadanya seperti tombak, tali pelembar batu dan lembing dan saat menjelang subuh gerombolan tersebut ditarik mundur (Arif Iskandar,1970, hlm. 31). Namun organisasi pasukan Diponegoro sudah mulai tertata walaupun masih dalam pola tradisional, pasukan yang disusun adalah prajurit keraton Sultan Hamengkubuwono III yang dirumahkan dan pulang kampung kemudian bergabung dengan pasukan Diponegoro. Seperti diketahui bahwa pasukan keraton harus dipangkas karena sejak perjanjian dengan Pemerintah Kolonial pasukan pengawal sultan saja yang diperbolehkan.

Dengan bantuan para ningrat dan kerabat keraton yang benci terhadap Belanda, perlahan pasukan Diponegoro mulai tertata rapi. Satuan-satuan reguler infanteri dan sedikit kavaleri tersusun, kekuatan kavaleri berkuda Diponegoro berjumlah sekitar 400 orang sebagai pasukan bekas kavaleri Mataram. Satuan infanteri dipimpin para Pangeran yang sangat teruji keloyalannya kepada Diponegoro dan pasukan yang terkenal adalah Pasukan Jero pimpinan Alibasah Abdul Mustofa

Prawirodirjo alias Sentot Alibasah. Pasukan khusus sabotase yang disebut Pasukan Kadjineman yang mempunyai keahlian sebagai pasukan sabotase.

Kepiawaian pasukan Diponegoro tersusun sedemikian rupa. Menurut Arief Iskandar dalam buku "Pembinaan Daya Mampu Dalam Pengelaran Perang Diponegoro (1970)" mengatakan bahwa pasukan reguler disusun sedemikian rupa membentuk sebuah poros dan inti dalam menyerang Belanda. Pasukan memanfaatkan alam dengan berteriak-teriak pada tebing sehingga suaranya menggema membuat musuh mengira bahwa jumlah pasukan sangat banyak. Pergerakan pasukan yang membuat tidak amannya pos-pos Belanda, jalur komunikasi dan sistem transportasi Belanda ini adalah taktik pasukan Diponegoro untuk tidak melakukan perang secara konvensional.

Kemenangan demi kemenangan pasukan Diponegoro hingga akhir tahun 1826 merupakan suatu pukulan telak bagi Belanda. Kerugian sangat besar pihak membuat pemerintah kolonial mengubah taktiknya. Adalah Hendrick Merkus Baron de Kock atau Jenderal de Kock pada tahun 1827 merupakan tahun titik balik perubahan strategi perang militer Belanda untuk melawan pasukan Diponegoro. Peralihan strategi dari mobilitas berganti dengan strategi benteng atau lebih dikenal dengan Stelsel Benteng. Strategi militer ini sangat unik baik dari aspek perencanaan pemikiran de Kock maupun pada pelaksanaan pertempuran melawan pasukan Diponegoro. Penjelasan oleh Kolonel Jhr.F.V.A Ridder de Stuer dalam memoar *Memories sur la guerre d'ile de Java de 1825-1830* pada tahun 1834 yang kemudian diterjemahkan oleh Letnan Kolonel H.M Lange dengan judul *Gedenkskrif van den Oorlog op Java van 1825 tot 1830* yang terbit pada tahun 1847 bahwa taktik ini belum pernah diterapkan karena mempunyai ciri yang unik. Pembuatan strategi dari perpaduan aspek politik, sosial, kultural dan seni.

Taktik benteng ini cukup efektif mempersempit gerakan pasukan Diponegoro

yang terkenal suka berpindah-pindah tempat. Setiap daerah yang ditaklukan Belanda akan bangun benteng pertahanan dimana setiap benteng dibangun jalur penghubung. Menurut Salim A. Fillah benteng yang dibangun membentang antara Cilacap Jawa Tengah hingga Kertosono Jawa Timur dan dengan taktik ini Belanda berhasil memukul mundur pasukan Diponegoro dan memaksa untuk menahan pembangunan benteng-benteng Belanda, hal tersebut tentunya membuat pasukan Diponegoro mengalami kerugian yang besar.

Menangkap Pangeran Diponegoro bukanlah hal yang mudah bagi Belanda, meskipun sudah melaksanakan taktik *benteng stelsel*, segala upaya terus dilakuka termasuk membuat sayembara. Hadiah besar berupa uang, gelar bangsawan, tanah dan gaji merupakan iming-iming Belanda namun tidak membawa hasil sesuai harapan. Sementara itu rakyat semakin giat melakukan perlawanan dan terus mengobarkan semangat pertempuran.

Tahun 1829 merupakan tahun yang berat bagi perlawanan Pangeran Diponegoro, dimana aktivitas pertempuran melawan Belanda mulai berkurang. Kekuatan pasukan juga menurun apalagi banyak para pemimpin-pemimpin perlawanan berhasil dilucuti oleh Belanda seperti Kyai Mojo penasihat spiritual Pangeran Diponegoro yang dilucuti di Surakarta dan dibuang ke Batavia kemudian Nyi Ageng Serang yang mundur dari medan laga karena kondisi fisiknya, Pangeran Suryo dan Aryo Prangwadono tertangkap.

Kondisi pasukan Diponegoro semakin melamah setelah Pangeran Bei gugur dan sebagai Senopati tinggal Sentot Prawirodirjo yang sangat ditakuti oleh Belanda, maka dari itu upaya untuk membujuk Sentot untuk menghentikan perlawanan melalui Bupati Madiun yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan Pangeran Prawiraningrat berhasil membujuk Sentot untuk menghentikan perlawanan dengan berbagai persyaratan. Setelah menerima persyaratan dari Sentot maka Belanda melakukan perundingan di Imogiri

pada tanggal 17 Oktober 1829. Kembalinya pasukan yang dipimpin Sentot ke Yogyakarta menjadi pukulan berat bagi Pangeran Diponegoro, namun prinsip perjuangannya masih terus berlanjut.

Cara-cara militer yang dilakukan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro tidak kunjung membuahkan hasil akhirnya pada 16 Februari 1830 Belanda berhasil mengadakan pertemuan. Pihak Belanda diwakili Kolonel Cleerens (Dekker, 1965) dan diadakan di Magelang, namun Pangeran Belanda hanya mau mengadakan pertemuan dengan pimpinan tertinggi Belanda di Jawa yaitu Jenderal de Kock. Dalam perundingan tersebut Belanda berjanji akan memberikan jaminan bahwa bila perundingan gagal maka Diponegoro diperbolehkan kembali. Namun janji tersebut bohong belaka, hal tersebut terbukti bahwa Jenderal de Kock memerintahkan Kolonel Cleerens untuk menangkap Diponegoro dan melucuti senjatanya. Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan wafat di Benteng Rotterdam Ujung Pandang pada tanggal 8 Januari 1855.

Sepeninggal Diponegoro selama dalam pembuangan perlawanan di Jawa mulai menurun, semakin melemah dan pada akhirnya tidak ada sama sekali. Kerugian selama lima tahun dari pihak pribumi menurut Peter Carey (1986) dimana lebih dari dua juta penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur dan pesisir utara mengalami penderitaan, perang berimbas pada kerusakan seperempat tanah yang sudah digarap dan siap untuk ditanami, serta hampir 200 jiwa meninggal dunia. Pihak Belanda juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, bahkan perang dengan Pangeran Diponegoro yang juga disebut Perang Jawa memakan korban dari pasukan berbangsa Eropa 8000 orang dan 7000 orang pribumi yang membantu Belanda, dari segi anggaran Belanda rugi sekitar 20 juta gulden untuk biaya perang.

Kebijakan politik kerajaan Belanda berubah di tanah Jawa, menghadapi pemberontakan Pasukan Diponegoro selama lima tahun kemudian pembangunan benteng dalam

rangka mempersempit ruang gerak pasukan pemberontak membuat kerajaan harus berusaha mendapatkan penghasilan untuk menutupi kerugian pasca perang. Gubernur Jenderal Johanes Van Den Bosch yang berkuasa di Jawa pada tahun 1830 memperkenalkan *Cultuur Stelsel* yaitu sistem penanaman jenis-jenis tanaman yang mempunyai komoditi perdagangan sangat dibutuhkan oleh pasar dunia.

Para elit konservatif Belanda menganggap bahwa tuntutan situasi saat itu dengan cara mengeksploitasi tanah jajahan sudah tepat, kekalahan yang besar selama perang memukul perekonomian Kolonial Belanda. Ada perbedaan cara pandang sebetulnya dikalangan kaum elit Belanda, dimana kaum liberal yang terpecah jadi dua belum sepenuhnya percaya pada pemerintah terkait rencana tersebut. Menurut kaum liberal masih mempertahankan prinsip-prinsip liberal untuk meminimalisir campur tangan pemerintah pada usaha perseorangan.

Namun rencana tersebut akhirnya terlaksana dimana dalam mencapai tujuan tersebut Bosch melakukan penanaman budidaya tembakau, tebu, kopi, teh, lada dan sebagainya (Kartodirjo, 1991). Komoditas tersebut sesuai dengan permintaan pasar dunia.

Pada waktu penduduk Jawa hampir 75% di paksa untuk menanam sehingga terkenal dengan istilah tanam paksa. Menurut perhitungan ditarsir hasil dari tanam paksa ini terjadi pasang surut, misalnya pada tahun 1850 turun 46% namun sepuluh tahun berikutnya pada 1860 menjadi 54,5%, meskipun saat itu sensus demografi masih simpang siur karena tergantung laporan para pejabat Belanda, sedangkan luas lahan garapan semakin tahun semakin luas.

Cultuurestelsel berdampak pada masuknya ekonomi uang di pedesaan, karena Raffles menentukan "*cultuure procen*" artinya bahwa jumlah prosentase yang diterima oleh Pejabat Belanda sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gudang-gudang pemerintah Belanda (Kurasawa Aiko, 1993). Disini rakyat sangat menderita menjadi sapi perah kaum

penjajah karena tidak mempunyai hak bahkan otoritas terhadap hasil panennya sendiri.

Kaum humanis mengatakan bahwa tanam paksa ini harus dihentikan karena sudah menindas dan menyengsarakan rakyat, Belanda terselamatkan setelah kerugian besar saat Perang Diponegoro dan ekonominya pulih dengan penindasan.

Peter Brooshooft dan C.Th Van Deventer adalah tokoh Belanda sebagai kritikus terhadap pemerintah kolonial yang telah menindas rakyat Indonesia. Maka pada saat itu tercetus suatu pemikiran bahwa pemerintah kolonial Belanda mempunyai tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi, nasib mereka harus diperhatikan maka tercetus pada waktu itu adalah politik etis.

Politik etis atau disebut sebagai Politik Balas Budi adalah hasil pemikiran dan kritik kaum intelektual Belanda terhadap kebijakan bahwa sistem *cultuurestelsel* menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia, sistem ekonomi liberal justru tidak membuat arah perbaikan terhadap pribumi karena mereka justru banyak kehilangan lahan garapan.

Kecaman tersebut di tuliskan dalam novel Max Havelaar sebagai pengungkap lain untuk mengurangi penderitaan pribumi, pada era 1870-1900 kapitalisme swasta memegang peranan besar dan berpengaruh yang sangat menentukan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Van Deventer seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia menyatakan dalam artikelnya bahwa Negeri Belanda berhutang kepada Indonesia, hutang tersebut harusnya dibayarkan dan memberi jalan prioritas utama untuk kepentingan pribumi, maka pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina mengumumkan suatu penyelidikan mengenai kesejahteraan pribumi dan penyelidikan itu berada di Jawa dengan demikian politik etis resmi di sahkan oleh Pemerintah Belanda.

Tahun 1902 Alexander W.F. Idenburg menjadi Menteri Urusan daerah-daerah jajahan mempunyai banyak peluang untuk memberikan ide dan pemikirannya untuk

mempraktekkan politik etis. Pemerintah Belanda menetapkan tiga prinsip dan dasar politik etis: Pendidikan, imigrasi dan irigasi. Belanda paham untuk melaksanakan program tersebut membutuhkan banyak dana. Pribumi akhirnya mendapatkan pendidikan dan emansipasi, arah dari pendidikan yang akan menjadi jembatan anatar timur dan barat, antara penjajah dan yang dijajah oleh karena itu timbul sebuah asimilasi dengan tujuan memberikan struktur sosial politik yang sama dengan Belanda, meskipun saat itu hanya kaum ningrat yang memiliki kesempatan menikmati hasil dari Politik Etis.

Politik yang sebetulnya di dominasi oleh golongan penguasa namun tidak ada sama sekali nilai-nilai etis, karena dalam pendidikan mempunyai gradualisme yang sangat menyolok dalam menyediakan pendidikan bagi anak pribumi kemudian adanya dualisme dalam pendidikan dengan adanya perbedaan antara sekolah Belanda dan sekolah pribumi. Kesempatan anak-anak kaum ningrat yang bisa masuk dalam sekolah Belanda.

Sekolah yang didirikan oleh Belanda seperti yang kita ketahui adalah HIS (Hollandsch Indlansche School) level sekolah dasar untuk kalangan atas, MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) level sekolah dasar kelas bawah, sementara untuk Sekolah Menengah ada AMS (Algemeene Middlebare School) dan Setara Sekolah Menengah Atas ada Kweek School, Technical Hoges School, School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA). Cendikiawan bermunculan dimana kaum ningrat yang terpelajar melek akan politik menjadi pelopor pergerakan nasional seperti Budi Oetomo oleh mahasiswa STOVIA.

Kaum terpelajar yang pandai di Indonesia mulai bermunculan sebagai motor pergerakan nasional yang berhasil menyatukan bangsa Indonesia menjadi suatu kekuatan nasional hingga Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pergerakan nasional sebagai wadah perjuangan bangsa dalam rangka melepaskan diri dari

belenggu penjajahan yang lebih terorganisir, tidak lagi terbagi dalam kompartemen kedaerahan dan tidak tergantung pada kharisma Pemimpin.

SIMPULAN

Perang Diponegoro yang menguras banyak anggaran pemerintah kolonial Belanda membuat penjajah harus membuat strategi untuk menghentikan perang tersebut, kerugian besar akibat pembangunan benteng dalam mempersempit pergerakan pasukan Diponegoro dibayar mahal dengan menghabiskan penghasilan Belanda di tanah jajahannya. Segala cara yang dilakukan Belanda dalam memulihkan pendapatannya terutama dengan cara tanam paksa yang sangat menyengsarakan pribumi.

Politik etis yang ditetapkan oleh kolonial ternyata justru membuat para kaum ningrat sadar untuk menyusun suatu pergerakan nasional dilingkungan sekolah, STOVIA sebagai tempat dan wadah para Mahasiswanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini bahwa pengalaman sejarah menjadi guru terbaik dalam menentukan strategi masa depan, dimana generasi muda yang harus siap dan rela ikut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Tendangan bola salju Diponegoro mengalirkan fakta sejarah hingga bangsa ini memperoleh kemerdekaan dari belenggu penjajah, saran yang disampaikan oleh peneliti adalah banyak generasi muda yang sekarang sudah hidup didalam alam kemerdekaan lupa bahwa kemerdekaan ini tidak mudah dicapai, melalui perjuangan dan nyawa sebagai taruhan. Pendidikan bela negara harus terus disosialisasikan supaya anak bangsa ini paham bahwa nenek moyangnya adalah pejuang, bukan pengemis kemerdekaan. Tidak hanya mengikuti gaya hidup modern yang seakan-akan lupa jati diri sebagai bangsa pejuang.

REFERENSI

- Ariwibowo, T. (2021). Strategi perang semesta: pertempuran pangeran diponegoro menghadapi belanda 1825-1830. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2537-2550.
- Asna, H. (2019). Karakteristik manuskrip al-quran pangeran diponegoro: telaah atas khazanah islam era perang jawa. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 13(02).
- Aziz, M. R. (2022). Sikap pangeran diponegoro terhadap etnis tionghoa di kesultanan yogyakarta tahun 1822-1830 m (*Doctoral dissertation*, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Cahyono, E. (1988). *Karesidenan pekalongan kurun kultur stelsel masyarakat pribumi menyongsong pabrik gula*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, unpublished thesis.
- Carey, P. (2011). *Kuasa ramalan: pangeran diponegoro dan akhir tatanan lama di jawa, 1785-1855*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Carey, P. (2014). *Takdir, riwayat pangeran diponegoro*. Kompas Gramedia.
- Dewi, V. M. (2020). Pangeran diponegoro dalam perang jawa 1825-1830. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 2(2), 147-158.
- Djordjevic, N. (2014). The depiction of a (national) hero: Pangeran Diponegoro in paintings from the nineteenth century until today (*Doctoral dissertation*, UNS (Sebelas Maret University)).
- Fuadi, M. A. (2021). Kepemimpinan perempuan: peran ratu ageng terhadap perjuangan pangeran diponegoro dalam perang jawa 1825-1830. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2).
- Hermawati, M. (2013). Tanam paksa sebagai tindakan eksploitasi. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 64-70.
- Istiningsih, G., & Dharma, D. S. A. (2021). Integrasi nilai karakter diponegoro dalam pembelajaran untuk membentuk profil pelajar pancasila di sekolah dasar. *Jurnal Kebudayaan*, 16(1), 25-42.
- Prasetyo, A., Susanto, D., & Rante, H. (2019, September). Development of animatic comic website: the lifestory of pangeran diponegoro. In *2019 International Electronics Symposium (IES)* (pp. 202-207). IEEE.
- MARDIYONO, P. (2020). *Melacak gerakan perlawanan dan laku spiritualitas pangeran diponegoro* (Vol. 99). Araska Publisher.
- Muhibbuddin, M. (2018). *Konflik dan taktik perang jawa 1825-1830 menelusuri jejak jihad dan pengorbanan pangeran diponegoro*. Araska Publisher.
- Ruspandi, F. (2008). *Perang diponegoro*. Be Champion.
- Santoso, I. (2016). Pasukan khusus pangeran diponegoro masih menari (studi historis kesenian tari tradisional reyog bulkiyo blitar). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(1), 21-27.
- Setyo, P. N., Hamzah, A., & Alin, L. (2022). *Romantisisme potret pangeran diponegoro: sebuah penciptaan lukisan*.
- Siregar, I., & Kurniawati, W. (2023). Pangeran diponegoro pahlawan nasional dalam novel remy sylado sebagai sumber belajar sejarah. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 13(1), 257-263.
- Surjo, D. (1990). Kepemimpinan pangeran diponegoro dalam perspektif sejarah. *Humaniora*, (2).
- Wibowo, C., Sudiarso, A., & Prihantoro, K. (2023). Analisis kepemimpinan pangeran diponegoro pada perang jawa dalam menegaskan kedaulatan kesultanan yogyakarta (ditinjau dari teori seni perang sun-tzu). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1116-1122.